

Manajemen Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya

Andri^{1*}

¹ Universitas Tanjung Pura; Jl. Prof. Dr. H. JI. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124; e-mail: andri@faperta.untan.ac.id

* Korespondensi: e-mail: andri@faperta.untan.ac.id

Diterima: 02/07/24 ; Review: 24/07/24 ; Disetujui: 14/08/24

Cara sitasi: Andri A. 2024. Manajemen Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Administrasi Kantor. 12 (1): 98-107.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Program KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengaturan kelahiran. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pelaksana program serta partisipan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KB di Kecamatan Sungai Raya telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi yang efektif dan keterbatasan sumber daya, termasuk tenaga medis dan fasilitas pendukung. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program ini terus meningkat, yang terlihat dari partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan terkait KB. Studi ini merekomendasikan peningkatan kapasitas tenaga pelaksana dan optimalisasi sumber daya untuk memastikan keberlanjutan program serta pencapaian target yang lebih baik di masa depan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Keluarga Berencana.

Abstract: This study aims to analyze the management implementation of the Family Planning Program (KB) in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. The KB program is one of the government's efforts to control population growth and improve the quality of life of the community through birth control. This study uses a qualitative descriptive approach, with in-depth interview methods and direct observation of program implementers and participants in the field. The results of the study indicate that the implementation of the KB Program in Sungai Raya District has been running well, but there are still several obstacles, such as the lack of effective socialization and limited resources, including medical personnel and supporting facilities. However, public awareness of the importance of this program continues to increase, as seen from active participation in various activities related to KB. This study recommends increasing the capacity of implementing personnel and optimizing resources to ensure the continuation of the program and better target achievement in the future.

Keywords: Implementation, Public Policy, Family Planning.

1. Pendahuluan

Data sensus penduduk tahun 2023, pada Provinsi Kalimantan Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.623.328 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 2.787.213 jiwa orang penduduk laki-laki, yang menyumbang sekitar 51,47 persen dari

populasi total Kalimantan Barat. Data demografis Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 mencerminkan komposisi gender yang hampir seimbang, dengan sekitar 2.627.177 penduduk perempuan, atau sekitar 48,53 persen dari total penduduk [Karyana, 2021].

Selama dekade sebelumnya, dari tahun 2010 hingga 2020, provinsi ini mencatat pertumbuhan penduduk yang signifikan, dengan penambahan sekitar 10.944.741 jiwa, atau rata-rata 729,65 ribu jiwa setiap tahun. Dengan kepadatan penduduk sekitar 1.365 jiwa per km² selama periode tersebut, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk ke-19 di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Kabupaten Kubu Raya di dalam provinsi ini juga mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi [Akhmad et al., 2022], dengan populasi mencapai 1,595 juta jiwa pada September 2020, menunjukkan penambahan sebesar 130.163 jiwa atau rata-rata 10.847 jiwa dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu 2010-2020 adalah sekitar 1.05 persen.

Sesuai dengan arah pembangunan Pemerintah periode 2019-2024, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) [Nasional, 2015], terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Kemudian di dalam Strategi Pembangunan Nasional 2019-2024 (Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta mental / Karakter (Revolusi Mental).

BKKBN bertanggung jawab untuk meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan pertumbuhan yang seimbang. Terkait dengan integrasi penduduk dengan pembangunan diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada (Tjiptoherijanto, 2010), dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan yang berfokus pada aspek kependudukan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

telah memperkuat pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB). Hal ini diwujudkan melalui program yang dikenal sebagai "Bangga Kencana" yang mengusung berbagai kegiatan prioritas [Renova, 2019]. Program ini memiliki dua dimensi utama: pertama, pengendalian kuantitas penduduk dengan tujuan mengatur perubahan jumlah, struktur, komposisi, dan persebaran penduduk agar seimbang sesuai dengan daya dukung lingkungan; kedua, peningkatan kualitas kehidupan penduduk dengan memberikan kontribusi terhadap tercapainya norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Dengan pendekatan ini, BKKBN berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek kependudukan dan kesejahteraan keluarga.

Sebuah program dan kebijakan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung yang esensial, termasuk komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagaimana disebutkan oleh birokrasi [Edwards III, 1980]. Komunikasi memiliki peran penting dalam menjelaskan dan menyampaikan implementasi kebijakan Program Keluarga Berencana sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh [Tifannii et al., 2020] menegaskan bahwa komunikasi merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan publik. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kubu Raya memiliki peran sentral dalam menjalankan komunikasi ini dengan masyarakat. Namun, komunikasi yang efektif juga memerlukan dukungan sumber daya, baik dalam bentuk sumber daya manusia yang berkualitas maupun sumber daya non-manusia seperti fasilitas dan sarana prasarana yang memadai. Disposisi, yaitu watak dan karakteristik implementor kebijakan, juga memainkan peran penting dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku [Hz et al., 2022].

Berdasarkan hasil pengamatan awal di wilayah penelitian, terdapat asumsi bahwa beberapa faktor memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Keluarga Berencana, terutama dalam meningkatkan partisipasi KB Aktif. Salah satunya adalah kurangnya kejelasan pesan yang disampaikan oleh petugas kepada sasaran, yang dalam hal ini adalah Pasangan Usia Subur. Hal ini terjadi karena jumlah petugas penyuluh KB yang terbatas, serta kemampuan mereka dalam menyampaikan pesan sesuai dengan arahan pembuat kebijakan di tingkat Kabupaten Kubu Raya yang masih perlu ditingkatkan. Disposisi dan struktur lembaga implementator juga belum optimal, masih

dalam proses pencarian bentuk yang lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Semua faktor ini menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan efektivitas program Keluarga Berencana di wilayah tersebut.

Selain faktor-faktor tersebut di atas terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja implementasi program peningkatan kesertaan KB Aktif yaitu keadaan sosial masyarakat terkait faktor “budaya banyak anak banyak rejeki” yang masih merebak di lingkungan masyarakat, Adanya penolakan dari organisasi keagamaan tertentu terhadap program KB khususnya KB Aktif, jumlah dan kemampuan tenaga medis terlatih pelayanan KB masih rendah dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait seperti SKPD KB, Dinas Kesehatan dan BPJS setempat [Zaeni, 2006], Penulis akan mengadopsi pandangan Van Meter dan van Horn, yang menyatakan bahwa ada berbagai variabel yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Faktor-faktor ini mencakup standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan yang ditetapkan, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan, tingkat komunikasi antar organisasi terkait dan pelaksanaan kebijakan, serta konteks lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di mana kebijakan tersebut dijalankan. Semua variabel ini memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana sebuah kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif yang akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti, termasuk bagaimana unsur-unsur dalam variabel penelitian saling berinteraksi dan menghasilkan produk dari interaksi tersebut [Hair Jr et al., 2010]. Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan dan mendeskripsikan sesuatu yang diperoleh dari lapangan, kemudian dijelaskan secara verbal. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data utama serta data tambahan sebagai pelengkap, yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen dari sumber pendukung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Analisis data Kualitatif

Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Dari analisis data yang dilakukan, ditemukan beberapa temuan penting. Pertama, dalam aspek komunikasi, sosialisasi pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Kubu Raya belum mencapai hasil yang optimal. Meskipun sosialisasi telah dilakukan hingga tingkat kecamatan, rendahnya tingkat pendidikan di sana menyebabkan informasi yang disampaikan tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih rutin dan pelatihan terkait peraturan Program KB untuk para petugas di lapangan.

Kedua, terkait disposisi, terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan Program KB karena belum adanya petunjuk pelaksanaan Program KB di tingkat kabupaten. Meskipun kebijakan Program KB didasarkan pada Peraturan BKKBN No. 13 tahun 2022, ketiadaan petunjuk pelaksanaan menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan program. Koordinasi yang baik antara Dinas, UPTD, serta tingkat kecamatan, desa, dan masyarakat sangat penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pengembangan Keluarga di Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga, terkait sumber daya manusia, ditemukan ketidakseimbangan dalam jumlah personel yang ditempatkan di bidang-bidang yang mengelola Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Beberapa bidang memiliki staf yang terbatas untuk menangani pengelolaan dana Program KB. Keterbatasan ini menghambat pengelolaan dan pelaksanaan program KB serta pembangunan keluarga. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu mempertimbangkan penambahan jumlah personel di bidang-bidang tersebut dan memastikan adanya personel yang berkualitas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program KB.

Keempat, dalam hal sarana penunjang kegiatan, terdapat hasil yang positif. Sarana dan prasarana yang didanai oleh Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana (KB) cukup memadai. Pengadaan sepeda motor, rehabilitasi dan kelengkapan balai penyuluhan, serta peralatan (saprasi) untuk penyuluhan KB dan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT

untuk program penurunan Stunting telah memberikan dampak positif dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyuluhan serta pelayanan KB dan BKB.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program KB di Kabupaten Kubu Raya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait sosialisasi, disposisi, dan sumber daya manusia. Namun, keberhasilan dalam pengelolaan sarana penunjang kegiatan menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efisiensi program. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam hal sosialisasi yang lebih intensif, pembuatan petunjuk pelaksanaan yang jelas, peningkatan jumlah dan kualitas personel, serta pemeliharaan optimal terhadap sarana dan prasarana yang telah ada. Dengan demikian, implementasi kebijakan Program KB di Kabupaten Kubu Raya dapat mencapai tingkat optimal dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi Masyarakat.

3.2 Pembahasan

Penelitian ini menggabungkan kedalam metode kualitatif untuk mengevaluasi implementasi Program Keluarga Berencana dibagi berdasarkan tiga dimensi, diantaranya: Komunikasi, Disposisi, dan Sumber Daya.

1. Implementasi Kebijakan Program KB dalam dimensi Komunikasi

Dalam dimensi Komunikasi, mayoritas responden memberikan respons positif terhadap efisiensi pelaksanaan program KB, meskipun ada kelompok kecil yang merasa pelayanan belum memenuhi harapan mereka dalam hal kecepatan dan efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam efisiensi pelayanan untuk memastikan kepuasan semua masyarakat. Terkait kejelasan, mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap pembuatan pertimbangan tertulis atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dinas KB. Namun, terdapat sebagian kecil responden yang memberikan penilaian negatif, menandakan perlunya perbaikan dalam komunikasi dan pertimbangan kebijakan. Dalam hal konsistensi, mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan pelayanan Dinas KB yang sesuai dengan prosedur pelayanan untuk Program KB. Namun, ada sebagian kecil responden yang memberikan penilaian negatif terhadap konsistensi dalam sosialisasi kebijakan dari pusat hingga tingkat pelaksana. Ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme sosialisasi kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan Program KB dalam dimensi Disposisi

Pada dimensi Disposisi, hasil penelitian menunjukkan variasi pendapat responden terkait dengan pelaksanaan pengangkatan birokrat oleh Dinas KB. Oleh karena itu, perlu ada lebih banyak dialog dan penelitian lanjutan untuk memahami perbedaan pandangan ini dan mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul terkait proses pengangkatan birokrat. Dalam hal pelaksanaan implementasi yang tidak memiliki dedikasi, responden memiliki pandangan yang beragam, menyoroti pemahaman yang berbeda tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program KB. Oleh karena itu, Dinas KB dapat melakukan komunikasi yang lebih baik dengan responden untuk memahami perspektif mereka. Terkait insentif, hasil penelitian menunjukkan variasi pendapat responden terkait dengan praktik pemberian anggaran tambahan oleh Dinas KB. Oleh karena itu, komunikasi yang lebih baik diperlukan untuk menjelaskan manfaat dan tujuan dari pemberian anggaran tambahan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan Program KB.

3. Implementasi Kebijakan Program KB dalam dimensi Sumber Daya

Selanjutnya, dimensi Sumber Daya menunjukkan hasil analisis variasi dari pendapat responden terkait ketersediaan staf yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan Program KB dan informasi yang diberikan oleh tim pelaksana Program KB. Hal ini menyoroti pentingnya evaluasi dan perbaikan dalam komunikasi antara tim pelaksana dan pelaksana kebijakan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik dan pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif. Dalam hal wewenang, perbedaan persepsi responden mengenai sifat formal dari wewenang yang diberikan kepada tim pelaksana Program KB menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik untuk menjelaskan dan memastikan pemahaman yang konsisten. Terkait fasilitas, perbedaan persepsi responden tentang peran Dinas KB dalam menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan Program KB menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebutuhan fasilitas dan peningkatan fasilitas yang tersedia.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan pentingnya meningkatkan komunikasi, pemahaman, dan transparansi antara Dinas KB, tim pelaksana, dan masyarakat untuk memastikan implementasi kebijakan Program KB yang efektif dan berkelanjutan. Evaluasi terus-menerus terhadap kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas, dan dana serta peningkatan praktik pendokumentasian juga sangat diperlukan

untuk mendukung keberhasilan kebijakan Program KB di tingkat lokal. Dengan memperdalam pemahaman ini melalui dialog dan komunikasi yang efektif, Dinas KB dapat mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dan peningkatan dapat dilakukan, memastikan bahwa program KB dan Pembangunan Keluarga berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

4. Kesimpulan

Dalam implementasi kebijakan Program KB di Kabupaten Kubu Raya, terlihat bahwa pendekatan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kebutuhan masyarakat sangat beragam. Ini mengindikasikan pentingnya menyelaraskan program-program KB dengan karakteristik dan kebutuhan unik setiap wilayah. Selain itu, evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada, termasuk petunjuk teknisnya, merupakan langkah yang krusial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan di tingkat kabupaten. Penambahan sumber daya manusia dan optimalisasi sarana penunjang juga menjadi langkah yang penting untuk memastikan keberlanjutan program KB dan pembangunan keluarga di Kabupaten Kubu Raya.

Untuk mengatasi keterlambatan implementasi kebijakan Program KB, perlu ditingkatkan koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu memberikan petunjuk teknis yang jelas dan mendukung pelaksanaan di tingkat daerah, sementara pemerintah daerah harus merespons kebijakan dengan cepat dan mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas program KB dan pembangunan keluarga. Dalam jangka panjang, penting untuk memperkuat pendekatan holistik terhadap program KB dan pembangunan keluarga. Hal ini mencakup peningkatan akses pendidikan, perbaikan kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Pendekatan ini memerlukan kerjasama lintas sektoral dan partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan keluarga.

Dalam menghadapi semua tantangan ini, sinergi antara pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga non-profit, hingga masyarakat luas, sangat penting. Kolaborasi aktif dari berbagai pihak akan membantu mencapai tujuan bersama dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Dengan langkah-langkah yang tepat dan

koordinasi yang lebih erat, implementasi kebijakan Program KB dan program-program KB lainnya dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di Kabupaten Kubu Raya dan Indonesia secara keseluruhan.

Referensi

- Akhmad, D., Peirisal, T., & Komara, M. (2022). Faktor-Faktor Determinan Kebijakan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kubu Raya 2017-2022. *JURNAL STUDI ADMINISTRASI PUBLIK*, 7(2).
- Anderson, P., Chisholm, D., & Fuhr, D. C. (2009). Effectiveness And Cost-Effectiveness Of Policies And Programmes To Reduce The Harm Caused By Alcohol. *The Lancet*, 373(9682), 2234–2246.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly. Inc.
- Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2010). SEM: An Introduction. *Multivariate Data Analysis: A Global Perspective*, 5(6), 629–686.
- Hz, D. M., Kencana, N., & Kariem, M. Q. (2022). Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga Di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. *Thejournalish: Social And Government*, 3(3), 224–233.
- Jennings, R. (1987). Unsystematic Security Price Movements, Management Earnings Forecasts, And Revisions In Consensus Analyst Earnings Forecasts. *Journal Of Accounting Research*, 90–110.
- Karyana, Y. (2021). Evaluasi Kesalahan Proyeksi Penduduk Tahun 2020 Untuk Memproyeksikan Penduduk Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Statistika*, 92–98.
- Khalish, M., Supriatna, T., & Mansur, H. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (Bokb) Dalam Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(3), 489–514.
- Moleong, L. J. (1988). *Tekhnik Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasional, B. K. D. K. B. (2015). Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga

- Berencana Nasional Tahun 2015-2019. *Jakarta: Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.*
- Oka, G. P. A. (2022). *Model Konseptual Pengembangan Produk Pembelajaran.* Deepublish.
- RENOVA, R. (2019). *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) DI Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.* Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1982). *Bureaucracy And Policy Implementation. (No Title).*
- Schofield, J., & Sausman, C. (2004). Symposium On Implementing Public Policy: Learning From Theory And Practice: Introduction. *Public Administration, 82(2), 235–248.*
- Sembiring, M. B., Simbolon, M. L., Sinuhaji, L. N. B., & Sambas, H. N. (2022). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Bidan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ibu Nifas Terhadap Konseling Keluarga Berencana (KB) Di Puskesmas Gandapura Kabupaten Bireuen Tahun 2021. *Jurnal Kesehatan Dan Fisioterapi, 209–214.*
- Smith, R. T. (1973). The Matrifocal Family. *The Character Of Kinship, 121–144.*
- Tifannii, W. F., Mayasari, M., & Rifai, M. (2020). Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Upaya Menekan Pertumbuhan Penduduk Di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 7(3), 525–540.*
- Tjiptoherijanto, P. (2010). Menuju Pembangunan Berwawasan Kependudukan. *Populasi, 11(1).*
- Zaeni, A. (2006). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria Di Kecamatan Gringsing.* Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.